

**OPTIMALISASI ADMINISTRASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN
KETAHANAN KELUARGA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Gilang Asmanu Rah Huda¹, Radjikan²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

gilangasmanu1605@gmail.com, radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan keluarga sejahtera. Pelaksanaan program ini membutuhkan dukungan administrasi yang efektif agar layanan dapat optimal. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa dalam pengelolaan administrasi KB dan berkontribusi pada efektivitas layanan publik. Metode yang digunakan meliputi partisipasi aktif dalam kegiatan administrasi, dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo selama 35 hari. Mahasiswa berpartisipasi dalam verifikasi data peserta program KB dan penyusunan dokumen administratif. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pengelolaan data dan sosialisasi program, namun juga ditemukan potensi perbaikan melalui peningkatan koordinasi antar unit dan penggunaan teknologi informasi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas layanan KB melalui dukungan administrasi yang lebih sistematis. Kesimpulannya, pengelolaan administrasi yang baik dapat mendukung keberhasilan program keluarga berencana, dan perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat.

Kata kunci : Keluarga Berencana (KB), Efektivitas layanan, Pengelolaan administrasi

ABSTRACT

The Family Planning Program (KB) is a government initiative that aims to improve the quality of human resources through the development of prosperous families. The implementation of this program requires effective administrative support so that services can be optimized. The purpose of this community service activity is to increase students' understanding and involvement in the management of KB administration and contribute to the effectiveness of public services. The methods used included active participation in administrative activities and documentation at the Sidoarjo Regency Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning for 35 days. Students participated in verifying the data of KB program participants and preparing administrative documents. The results of the community service showed that there were obstacles in data management and program socialization, but there was also potential for improvement through increased coordination between units and the use of information technology. This activity contributed to improving the effectiveness of family planning services through more systematic administrative support. In conclusion, good administrative management can support the success of family planning programs, and there needs to be continuous efforts to improve the effectiveness of services to the community.

Keywords : Family Planning (KB), Service effectiveness, Administrative management

PENDAHULUAN

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sustainable Development Goals (SDGs) menetapkan target kesehatan yang baik dan kesejahteraan sebagai salah satu tujuan pembangunan global, dengan fokus khusus pada perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi sebagai kunci pencapaian pembangunan berkelanjutan. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia. Keluarga yang sejahtera tidak hanya diukur dari kondisi ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, membangun hubungan yang harmonis. Program keluarga berencana telah diakui secara internasional sebagai intervensi kesehatan masyarakat yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (United Nations Population Fund, 2019). Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan kesehatan, tetapi juga pada efektivitas sistem administrasi yang mendukung implementasi kebijakan di tingkat operasional. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan kesehatan, tetapi juga pada efektivitas sistem administrasi yang mendukung implementasi kebijakan di tingkat operasional.

Di Indonesia, program Keluarga Berencana menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak diluncurkan pada tahun 1970-an, program ini telah mengalami transformasi yang signifikan, dari kebijakan yang berfokus pada pengendalian penduduk menjadi upaya pembangunan keluarga yang menyeluruh melalui integrasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga. (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2020). Dalam implementasinya, keberhasilan program Keluarga Berencana ditentukan oleh kualitas tata kelola dan sistem administrasi di tingkat daerah, khususnya dalam hal pendataan peserta, perencanaan kegiatan, alokasi sumber daya, serta monitoring dan evaluasi program. Pengabdian ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi yang efektif dapat meningkatkan akurasi data, memperbaiki kualitas layanan, dan memastikan program mencapai sasaran yang tepat.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah dengan tingkat urbanisasi dan dinamika sosial ekonomi yang tinggi di Jawa Timur menghadapi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo memiliki tanggung jawab strategis dalam melaksanakan berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala administratif yang menghambat efektivitas pelayanan, antara lain ketidaktepatan dan ketidaklengkapan data peserta program, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data, serta minimnya koordinasi antarunit pelaksana. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya perencanaan dan evaluasi program, sehingga target kesejahteraan keluarga menjadi sulit tercapai secara maksimal.

Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat di instansi pemerintah merupakan salah satu strategi yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui partisipasi langsung dalam kegiatan operasional instansi, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis yang memperkaya pemahaman akademis, tetapi juga dapat memberikan dukungan teknis dalam pengelolaan administrasi, memberikan perspektif baru, serta mengidentifikasi peluang perbaikan sistem yang ada. Kegiatan magang ini juga sejalan dengan konsep link and match antara dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja, sekaligus mewujudkan peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan pengalaman pengabdian yang telah dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo selama 35 hari, teridentifikasi berbagai aspek dalam pengelolaan administrasi program Keluarga Berencana yang

memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan. Mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan verifikasi data peserta program, penyusunan dokumen administratif, rekapitulasi data kegiatan lapangan, serta pengelolaan sistem pelaporan. Melalui keterlibatan tersebut, ditemukan bahwa meskipun terdapat kendala dalam pengelolaan data dan koordinasi antarunit, namun juga terdapat potensi besar untuk peningkatan melalui optimalisasi sistem administrasi berbasis teknologi informasi dan penguatan koordinasi internal.

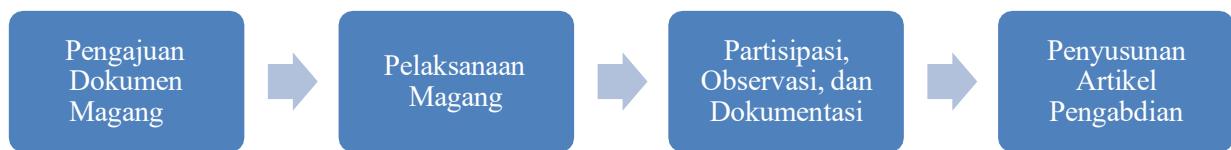
Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penguatan layanan administrasi KB untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa dalam pengelolaan administrasi program Keluarga Berencana dan berkontribusi pada peningkatan efektivitas layanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam meningkatkan efektivitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta memberikan rekomendasi perbaikan melalui peningkatan koordinasi antar unit dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya akan mendukung keberhasilan program KB, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Sidoarjo.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo di Jl.Kwadengan Bar., Kwadengan Barat, Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan berlangsung selama 35 hari, terhitung mulai dari tanggal 14 Juni hingga 29 Agustus 2025 dengan hari kerja Senin sampai Jumat. Sebelum terjun langsung dalam pelaksanaan magang, kegiatan ini diawali dengan beberapa tahapan persiapan. Metode pengumpulan data dalam kegiatan magang ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses administrasi pelayanan KB, partisipasi aktif dalam kegiatan pendataan dan sosialisasi program, serta dokumentasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lapangan. Subjek dalam kegiatan ini mencakup pegawai pada Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan kegiatan dan dokumen yang relevan sebagai fokus analisis sehingga proses pengolahan data lebih terarah. Selain observasi partisipatif, mahasiswa juga melakukan wawancara informal dengan staf terkait untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai alur administrasi dan tantangan implementasi program KB di tingkat daerah.

Pelaksanaan magang ini diarahkan pada analisis efektivitas tata kelola administrasi layanan KB sebagai salah satu instrumen pendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas ketahanan keluarga. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator efektivitas organisasi yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pencapaian tujuan dianalisis melalui keteraturan dan ketepatan pemutakhiran data peserta KB, integrasi koordinasi antar-bidang dan jejaring kemitraan dalam mendukung kegiatan lapangan, serta adaptasi k instansi dalam menyesuaikan mekanisme administrasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan sistem layanan.

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa terlibat dalam verifikasi data peserta KB, penyusunan laporan kegiatan, serta pendampingan staf dalam pelaksanaan sosialisasi sehingga dapat memahami langsung prosedur kerja instansi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis mengenai administrasi publik, tetapi juga memungkinkan mahasiswa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan melalui masukan yang berbasis pada temuan empirik selama magang. Tahapan pelaksanaan dimulai dari observasi awal dan koordinasi dengan instansi terkait, dilanjutkan dengan pengajuan surat permohonan magang dan dokumen pendukung dari universitas, kemudian pelaksanaan aktivitas magang sesuai jadwal yang telah disepakati bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 1 Bagan Alir Kegiatan

HASIL dan PEMBAHASAN

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK). Instansi ini memiliki peran strategis dalam menjalankan program pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk seperti program Berlian (Bersama Lindungi Anak), GenRe (Generasi Berencana), dan program lainnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo merupakan organisasi perangkat daerah yang berada di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dinas ini memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks dengan pembagian tugas yang jelas pada setiap bidangnya.

Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo merupakan unit kerja pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam upaya membangun keluarga yang sejahtera, berkualitas, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan sosial yang dinamis. Unit ini menangani berbagai program yang tidak hanya berfokus pada pelayanan keluarga berencana, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga.

Sebagai bagian dari wilayah penyangga ibu kota provinsi, Kabupaten Sidoarjo memiliki karakter masyarakat yang heterogen. Perkembangan industri dan urbanisasi turut mendorong tingginya mobilitas penduduk. Situasi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program KB karena perubahan pola hidup yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga. Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga merupakan salah satu langkah untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan berbasis keluarga untuk menciptakan keluarga sejahtera dan berkualitas, yang menjadi pondasi ketahanan nasional.

Secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo memiliki kapasitas dan peran strategis dalam pelayanan publik, namun masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan pelayanan dengan kondisi masyarakat yang beragam. Karakteristik ini menjadi konteks penting dalam memahami hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Kondisi ini menjadi pembelajaran berharga bagi penulis untuk memahami bahwa pengelolaan program publik tidak hanya soal prosedur administratif, tetapi juga soal bagaimana membangun sinergi antaraktor yang terlibat.

Kegiatan magang yang berlangsung selama 35 hari kerja yang dilakukan menunjukkan bahwa peran administrasi menjadi kunci utama dalam mendukung kelancaran program KB di tingkat daerah. Melalui keterlibatan aktif dalam proses verifikasi data peserta program KB, rekapitulasi data dokumen terkait program keluarga berencana (KB), dan pengelolaan dokumen resmi lainnya telah memberikan pondasi yang kuat untuk perencanaan dan pelaksanaan program.

Pelayanan yang diberikan oleh Bidang KBKK kepada masyarakat, khususnya pasangan usia subur (PUS), salah satunya adalah Pendistribusian Alat Kontrasepsi. Selain itu, IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) juga menjadi mitra utama yang terlibat langsung dalam penyebarluasan informasi dan

pendampingan kepada masyarakat serta menjadi kunci keberhasilan program karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sosial setempat.

Dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat, Bidang KBKK juga mendorong peningkatan angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan implan. Upaya ini tidak selalu berjalan mulus karena masih terdapat persepsi salah mengenai risiko penggunaan alat kontrasepsi tertentu. Pada situasi seperti inilah peran pendampingan menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman serta membantu masyarakat mengambil keputusan secara tepat.



Gambar 1 Verifikasi data peserta program KB



Gambar 2 Memeriksa dan merekapitulasi Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program Bangga Kencana

Hasil kegiatan magang diatas penulis bisa mengetahui pentingnya alur administrasi yang tertib dan terstruktur. Menurut Siagian dalam bukunya tentang administrasi pembangunan, sistem administrasi yang baik akan menentukan efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut teori pelayanan publik, pelayanan yang efektif haruslah memenuhi prinsip-prinsip seperti tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (responsivitas), assurance (jaminan/keamanan), dan empathy (empati) (Hardiyansyah, 2018). Pelaksanaan program KB di Sidoarjo masih memerlukan peningkatan dalam aspek komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar kesadaran dan partisipasi warga dapat bertambah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari keberhasilan program Keluarga Berencana (United Nations Population Fund, 2019).

Selain itu, prinsip good governance menurut United Nations Development Programme (UNDP) dan World Bank menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo, 2018). Pengalaman magang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini di instansi mitra masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antarunit kerja dan kapasitas sumber daya manusia. Hambatan ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program, sehingga perbaikan terutama di bidang penguatan SDM, serta inovasi dalam sistem administrasi berbasis digital menjadi langkah strategis yang sangat dibutuhkan.

Temuan dari lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menemui hambatan, yakni rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program KB yang sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi efektif, hingga kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan koordinasi antar-unit yang belum maksimal, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, ketidaksesuaian data yang dimiliki oleh petugas lapangan dengan data yang tercatat di sistem pusat. Selain itu, sistem pencatatan dan pelaporan yang berjalan lambat dikarenakan keterbatasan sumber daya dan juga sistem digital yang belum dimanfaatkan secara optimal, ini berdampak pada rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan data pada saat melaksanakan pekerjaan.

Kegiatan pengabdian di Bidang KBKK memberikan gambaran bahwa pelayanan publik dalam sektor Pembangunan keluarga menuntut keseimbangan antara aspek administratif dan empati sosial. Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas menjadi landasan penting dalam setiap perencanaan program, namun keberhasilan di lapangan sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam program tersebut. Oleh karena itu edukasi, komunikasi yang efektif, serta pendampingan berkelanjutan menjadi hal yang di prioritaskan dalam pelaksanaan kegiatan program Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.

Selama menjalani magang, saya terlibat langsung dalam proses verifikasi administrasi, rekapitulasi laporan kegiatan, hingga pemutakhiran data penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Keterlibatan ini memberikan sudut pandang baru bagi saya, bahwa administrasi bukan hanya sebagai urusan dokumen, tetapi bagian dari pengambilan keputusan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Pengalaman mendampingi staf dalam memeriksa kelengkapan laporan membuat saya menyadari bahwa data yang akurat dapat mempercepat implementasi program dan meminimalkan kendala di tahap pelaksanaan.

Secara keseluruhan, program di bidang keluarga berencana dan ketahanan keluarga yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Sidoarjo sudah cukup memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga. Namun demikian, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, Perbaikan masih diperlukan di berbagai bidang, seperti peningkatan jumlah dan kapasitas petugas lapangan, perbaikan infrastruktur pendukung, dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Evaluasi program secara berkala dan pelatihan berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa metode dukungan yang digunakan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Jika semua persyaratan ini terpenuhi, program keluarga berencana tidak hanya akan menjadi alat pengendalian populasi tetapi juga fondasi untuk membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas bagi generasi mendatang serta memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap praktik pelayanan publik secara nyata

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan magang yang dilaksanakan di Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga (KBKK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana program pelayanan publik dijalankan, khususnya terkait pembangunan keluarga melalui program keluarga berencana. Bidang KBKK memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh edukasi, pendampingan, dan pelayanan yang mendukung terwujudnya keluarga sehat, sejahtera, dan mampu menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Namun demikian, hasil pengamatan juga memperlihatkan sejumlah tantangan. Pemahaman masyarakat terhadap program KB masih belum merata, sehingga edukasi dan sosialisasi perlu terus diperkuat. Koordinasi antarunit kerja dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan masih perlu ditingkatkan agar proses pelayanan berjalan lebih efisien. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia, inovasi digital, dan komunikasi publik yang adaptif menjadi aspek penting untuk mendukung efektivitas program di lapangan.

Berdasarkan berbagai temuan yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan magang, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah perlunya memperluas jangkauan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya komunikasi harus dilakukan secara lebih intensif melalui kegiatan langsung serta memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih modern. Dengan demikian, masyarakat dari berbagai kalangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai pilihan kontrasepsi dan manfaat keluarga berencana bagi kesejahteraan keluarga.

Selain itu, peningkatan kapasitas kader dan petugas lapangan juga sangat diperlukan. Sebagai ujung

tombak pelaksanaan program di masyarakat, para ASN perlu dibekali dengan pelatihan berkelanjutan, baik dalam penggunaan sistem pelaporan digital, pendekatan komunikasi efektif, maupun penanganan kendala di lapangan. Kesiapan sumber daya manusia ini akan mendukung terselenggaranya pelayanan yang lebih responsif dan berkualitas.

Integrasi teknologi dalam sistem administrasi juga menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Modernisasi dalam proses pendataan dan pelaporan perlu dilakukan agar perbedaan data antara petugas lapangan dan sistem pusat dapat diminimalkan. Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal diharapkan mampu mempercepat layanan serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi program KB.

Koordinasi lintas sektor juga harus diperkuat, khususnya melalui kerja sama dengan puskesmas, dan lembaga kemasyarakatan. Pendekatan kolaboratif ini akan membuat pelaksanaan program KB tidak hanya terfokus pada aspek administratif, tetapi juga mampu mengintegrasikan keserasian fungsi untuk menciptakan keluarga yang berkualitas.

Di sisi lain, evaluasi program secara berkala menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Monitoring yang berkesinambungan akan membantu menilai sejauh mana program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Dengan adanya evaluasi yang terencana, implementasi program dapat lebih adaptif terhadap dinamika perubahan sosial. Melalui langkah-langkah tersebut, program keluarga berencana di Kabupaten Sidoarjo diharapkan semakin mampu memberikan manfaat luas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadly, M., Z., Amin, S., J., Bakry, M., & Rasyid., A. (2024). Program Keluarga Berencana dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Agama dan Masyarakat Sosiologia* (Vol. 2, Nomor 2, May 2024, Halaman 1-10)
- Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 35-42.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Rahayuningsih, T., W., Igirisa, I., & Sulila, I. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo (Vol. 1, Nomor 10, May 2024, Halaman 1-5)